

ANALISIS PRINSIP AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DASAR SWASTA SANTA THERESIA I PANGKALPINANG

Brenda Angel

Novika

Hendarti Tri Setyo Mulyani

Accounting Program

STIE-IBEK Bangka Belitung

Pangkalpinang, Indonesia

e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract - This research is an analysis of the principles of accountability, transparency and effectiveness of school financial management at the Santa Theresia I Pangkalpinang Private Elementary School. This research aims to evaluate the application of the principles of accountability, transparency and effectiveness of school financial management at Santa Theresia I Pangkalpinang Private Elementary School. The method that researchers use is a qualitative descriptive analysis method where data collection uses observation, interview and documentation techniques. In this research, the author interviewed several sources including: School Principal, School Treasurer, and Chair of the School Committee. The research results show that Santa Theresia I Pangkalpinang Private Elementary School has demonstrated a commitment to accountability, legal compliance and integrity in its financial management. However, there are still areas that need improvement, such as increasing information transparency, active involvement of school committees, and evaluating the effectiveness of educational programs. Financial documentation is good but access to information is still limited, and supervision of the use of funds is not optimal. For future research, it is recommended to carry out further evaluation of the implementation of the recommendations proposed in this research. Additionally, the research focus could be expanded to explore the impact of improvements in school financial management on student academic achievement and parental satisfaction. Longitudinal studies can also be conducted to see developments and changes in school financial management practices over time.

Keywords: *Accountability, Transparency, and Effectiveness*

I. PENDAHULUAN

Di dunia pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, bidang kurikulum, dan ketua komite berperan penting dalam mencerdaskan generasi mendatang dan membentuk sifat serta sikap yang baik. Pendidikan tidak hanya tentang

materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan potensi diri manusia dalam segala aspek sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah BAB I bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 17 – 18 mendefinisikan “Satuan pendidikan yang bisa disebut Satdik adalah suatu kelompok layanan pendidikan yang melakukan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur formal, nonformal, bahkan informal pada setiap jenjang atau jenis pendidikan. Satuan pendidikan dasar yang bisa disebut Satdikdas merupakan jenjang pendidikan jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satdik berbentuk sekolah dasar atau sederajat serta menjadi satu kesatuan yang menjadi lanjutan pendidikan pada Satdik yang berbentuk sekolah menengah pertama atau sederajat.

Satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar bisa didirikan oleh pemerintah atau swasta. Pendidikan dianggap penting oleh masyarakat sebagai pondasi masa depan. Namun, pendidikan membutuhkan biaya, terutama di sekolah swasta. Ini menjadi pertimbangan bagi orang tua dengan pendapatan rendah. Pemerintah memberikan pendanaan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat dengan menyediakan pembiayaan pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, pembiayaan dan keuangan merupakan suatu potensi dalam menentukan keberhasilan layanan pendidikan, juga termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari suatu manajemen keuangan. Pembiayaan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, supaya uang yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan optimal demi tercapainya suatu tujuan pendidikan. Pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan sistem manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan sebaliknya jika manajemen suatu sekolah itu tidak baik maka semua kegiatan yang diterapkan dalam perencanaan suatu sekolah itu juga tidak akan berjalan dengan lancar. Pengelolaan keuangan sekolah didasari oleh prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip akuntabel, transparansi, efektif, dan efisien. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip itu digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang mencakup perencanaan, realisasi

penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan, dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban.

Dana BOS Reguler merupakan bantuan dana dari pemerintah untuk sekolah negeri dan swasta. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin dalam pendidikan dasar dan menengah. Sebelum pencairan, setiap satuan pendidikan harus membuat rencana kegiatan dan anggaran selama satu tahun anggaran. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas dana ini, sementara Bendahara BOS adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

Nopus, Shilvia Hayatun (2021, p.4), mengatakan bahwa terdapat regulasi khusus yang mengatur peraturan ini mengenai pengelolaan dan penyaluran dana BOS. Regulasi khusus ini sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah terbaru menggantikan Permendikbud No. 26 Tahun 2017 yang disahkan pada bulan Januari 2018, sehingga regulasi ini disebut dengan Juknis BOS.

Sekolah dasar swasta juga memiliki dana dari yayasan mereka sendiri dan dana tersebut disalurkan ke dalam rekening sekolah tiap bulan. Besaran dana setiap bulannya berbeda-beda sesuai dengan pengajuan surat biaya yang dikirim setiap awal bulan. Berarti dana tersebut tidak ditentukan besaran nominal dari yayasan, akan tetapi dana tersebut diberikan sesuai dengan berapa besaran yang diperlukan sekolah tersebut setiap bulannya. Dan itu pun akan dikoreksi kembali oleh Yayasan terhadap rincian anggaran untuk memastikan berapa besaran dana kebutuhan tersebut yang perlu diberikan.

Di samping itu, masih terdapat penyelewengan dalam mengelola keuangan sekolah meski telah ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Masalah utama adalah rendahnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Sekolah seharusnya memiliki laporan pertanggungjawaban yang meliputi neraca, laporan surplus, defisit, laporan arus kas, dan perhitungan biaya peserta didik. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kebutuhan tiap peserta didik dengan lebih mudah. Penyelewengan dana BOS sering digunakan untuk hal yang tidak sesuai rencana, merugikan sekolah dan mengabaikan peserta didik. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah tidak turun tangan untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Secara khusus dalam hal mengelola keuangan sekolah instansi SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang ini sudah baik, tetapi masih ada beberapa permasalahan terkait dengan akuntabilitas yaitu kurangnya partisipatif dari komite sekolah atau keterlibatan orang tua/wali peserta didik terhadap pembuatan RKAS, sering terjadinya bug atau error sistem pada saat penginputan data keuangan pada aplikasi RKAS, belum terdapat tim keuangan sekolah untuk memantau pengelolaan keuangan, dan belum mengevaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dana sekolah. Kedua, dalam hal pengkomunikasian dana bos dan dana yayasan kepada pihak eksternal seperti komite sekolah, para orang tua, dan masyarakat luas lainnya tidak transparan sehingga sering menyebabkan kesalahpahaman, karena banyak dari pihak eksternal yang tidak tahu mengenai pengelolaan dana bos dan yayasan ini sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman kepada satuan pendidikan seperti

memakan uang dana bos atau yayasan tersebut untuk kepentingan pribadi/komunitas. Ketidaktransparan ini juga ditemukan pada saat peneliti melihat bagian majalah dinding yang ada di sekolah tidak dipublikasikan mengenai rincian penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari BOS maupun yayasan. Ketiga, penggunaan dana bos maupun yayasan yang masih kurang efektif disebabkan oleh beberapa permasalahan, seperti realisasi penggunaan dana BOS Reguler yang masih memiliki sisa dana dan dana bos yang diterima oleh SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang terkadang masih mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan pihak sekolah melakukan peminjaman dana terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan untuk dana yang disalurkan yayasan untuk menunjang kebutuhan siswa, para karyawan, dan kegiatan yang diselenggarakan masih kurang efektif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Sekolah Dasar Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang.
2. Mengetahui prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Sekolah Dasar Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang.
3. Mengetahui prinsip efektivitas dalam pengelolaan keuangan Sekolah Dasar Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang.

II. LANDASAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Ross (1973) menciptakan teori agensi, yang kemudian diperluas oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam (Nadhifah & Arif, 2020) yang menyatakan bahwa teori agensi merupakan satu pihak (pimpinan) memberikan tugas dan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak lain (agen), yang kemudian menyelesaikan tugas tersebut atas nama pimpinan. Dalam kasus ini, baik direktur maupun agen dianggap sebagai pelaku ekonomi yang berpikiran logis dan bertindak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Sekolah, sebagai lembaga pendidikan di sektor publik, memiliki banyak *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, menurut Windarti (2015). Kepala sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah/Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya disebut agen. Sedangkan, Pemerintah/Yayasan/Orang Tua/bukan Orang disebut prinsipal. Pengelolaan keuangan sekolah menerima dana dan fasilitas dari prinsipal. Pengelola sekolah (agen) bertanggung jawab atas pengelolaan dana pendidikan, mulai dari penyajian hingga pengungkapan pelaporan secara menyeluruh terkait pengelolaan keuangan sekolah kepada prinsipal.

Teori Perilaku Manajemen

Salah satu konsep paling penting dalam ilmu keuangan adalah perilaku manajemen keuangan. Menurut Horne dan Wachowicz (2002) dalam Mien dan Thao (2015) mengatakan bahwa perilaku manajemen keuangan adalah penentuan, akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Secara umum, Weston dan Bringham dalam Mien dan Thao (2015) mengatakan bahwa perilaku manajemen keuangan adalah pengambilan keputusan keuangan yang menggabungkan motif individu dengan

tujuan perusahaan. Manajemen keuangan berkaitan dengan seberapa baik dana digunakan.

Perilaku manajemen keuangan mengacu pada kemampuan seseorang dalam hal-hal seperti perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, manajemen, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana keuangan dalam kehidupan sehari-hari (Kholilah dan Iramani, 2013). Menurut Ida dan Cinthia (2010) dalam Yulistia (2018), Perilaku Keuangan adalah cara untuk mengelola dana yang dimiliki dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan.

Teori Legitimasi

Teori ini sangat dipercaya sebagai dasar penelitian keberlanjutan laporan. Menurut teori ini, seluruh organisasi harus melakukan tindakan sosial untuk mencapai tujuan. Laporan keberlanjutan digunakan sebagai tindakan operasi sebagai tanggapan terhadap lingkungan masyarakat. Selain itu, teori ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat rasionalitas tertentu saat membentuk beberapa kelompok dan individu yang memiliki potensi untuk mempengaruhi aktivitas perusahaan. Tujuan manajemen strategis adalah untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Teori pemangku kepentingan mendefinisikan pihak mana yang harus bertanggung jawab. Kegiatan perasional ini melibatkan manajemen, direksi, karyawan, dan masyarakat. Menurut teori ini, perusahaan bertanggung jawab untuk membantu pemerintah dan masyarakat sekitar serta investor dan pemilik. Teori ini juga menjelaskan bahwa entitas yang terlibat harus melakukan operasi untuk pemegang kepentingan lainnya. Adapun yang terlibat, yaitu para orang tua/wali peserta didik, guru dan karyawan, kepala sekolah/wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Teori Regulasi (Regulation Theory)

Menurut teori ini, undang-undang dibuat untuk meningkatkan kinerja ekonomi dengan menghindari laporan keuangan pengguna (Yasdar & Mulyadi, 2018). Sebuah regulasi dibuat untuk berbagai alasan. Yang paling penting adalah membuat regulasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna.

Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus didasarkan pada sinyal, baik positif maupun negatif, yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan.

Akuntabilitas

Menurut Lailia, Umi Nur (2018, p.13), "akuntabilitas keuangan adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban lembaga pendidikan terhadap keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana pemerintah ataupun dana sumbangan dari pihak lain". Menurut Nopus, Shilvia Hayatun (2021, p. 18), "akuntabilitas adalah sebuah kewajiban yang memberikan suatu pertanggungjawaban, kinerja, dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk dimintai keterangan ataupun pertanggungjawaban".

Menurut Nopus, Shilvia Hayatun (2021), terdapat empat indikator akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Transparansi

Rusdiana & Wardija (2022, p.12), mendefinisikan prinsip transparansi dan pembiayaan pendidikan adalah "sebuah keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan pada lembaga pendidikan".

Menurut Sutedjo (2009), indikator yang dapat menunjukkan transparansi sekolah, yaitu:

1. Keterbukaan kebijakan anggaran sekolah.
2. Keterbukaan dokumen anggaran sekolah.
3. Keterbukaan laporan pertanggungjawaban.
4. Terdapat kemudahan akses informasi bagi publik.

Efektivitas

Efektivitas seringkali diartikan sebagai sebuah tingkat pencapaian tujuan dari organisasi/instansi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Menurut Mardiasmo (2009:134) diambil dari jurnal Handayani, Nur (2020, p.4), mendefinisikan efektivitas adalah "ukuran berhasil tidaknya suatu lembaga dalam mencapai tujuannya".

Menurut Mulyono (2010:146), tugas dari pengelola keuangan ini terbagi menjadi tiga fase, yaitu:

1. Perencanaan anggaran,
2. Pelaksanaan anggaran, dan
3. Evaluasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai salah satu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis maupun lisan dari subjek yang diamatinya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu satuan pendidikan berstatus swasta yaitu Sekolah Dasar Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang, yang beralamat di Jalan Toniwen Nomor 101, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang.

Alasan peneliti menjadikan sekolah ini sebagai objek dalam penelitian karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang maju, sekolah yang memiliki akreditasi yang sangat baik, dan banyak masyarakat yang mempercayai sekolah ini sebagai tempat untuk mendidik anak-anak mereka dan menimba ilmu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan melakukan berbagai cara di antaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam pendekatan penelitian secara kualitatif ini dilakukan pada saat peneliti mulai terjun ke lapangan sampai selesai penelitian. Penelitian ini

difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Untuk analisis data, peneliti melakukan analisis yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah dilakukan, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diambil oleh peneliti dalam menganalisis datanya adalah dengan cara berikut:

1. Reduksi data;
2. Penyajian data; dan
3. Penarikan kesimpulan.

IV. PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator menurut Shilvia Hayatun (2021) dalam pengukuran akuntabilitas dalam sektor pendidikan terkait manajemen pengelolaan dana BOS dan Yayasan di SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang ini memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur untuk pencatatan setiap transaksi. Hal ini dapat dibenarkan karena peneliti telah melihat adanya buku pedoman Yayasan/S.K. Yayasan dan buku Juknis BOS yang digunakan serta terdapat aplikasi khusus yang digunakan dalam proses pencatatan/penginputan transaksi keuangan sekolah. Melalui pernyataan dari Ibu Martina Gultom selaku Bendahara BOS: "Aplikasi yang digunakan sesuai dengan sumber dana, jika sumber dana berasal dari Yayasan maka aplikasi yang digunakan adalah sistem berbasis web SIUS (Sistem Informasi Uang Sekolah) dan SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) dan apabila sumber dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat yaitu dana BOS maka aplikasi yang digunakan adalah ARKAS. Aplikasi ini dapat langsung dilihat oleh pihak Kemendikbud jika disinkronkan secara online, begitupula untuk web dari yayasan".

Peneliti juga melihat adanya arsip berupa laporan pertanggungjawaban yang telah dikirim setiap bulan beserta surat pengantar yang telah dicap dan diketahui sendiri oleh Kepala Sekolah dan dikerjakan oleh Bendahara Sekolah. Di dalam laporan tersebut berisikan informasi yang jelas disertai adanya bukti pendukung berupa kuitansi, faktur, nota, dsb.

Melihat beberapa situasi yang ada di lapangan peneliti belum memastikan bahwa sekolah ini telah mematuhi semua peraturan dan hukum terkait dengan pengelolaan keuangan. Tetapi, yang peneliti amati dan simpulkan dari hasil wawancara bahwa SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang ini telah mematuhi semua peraturan dan hukum dengan alasan bahwa SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang ini sering mengikuti beberapa arahan dari pihak Kemendikbud dan Yayasan terkait perubahan secara berkala terhadap pengelolaan keuangan, baik dalam hal peningkatan kinerja maupun dalam hal pengevaluasian hasil. Dengan alasan tersebut peneliti berpikir bahwa seringkali keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan maka para karyawan SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang akan dapat mematuhi peraturan dan hukum terkait pengelolaan yang disampaikan. Hal ini dapat diperkuat

dengan dokumentasi berupa buku tugas pelatihan guru dan karyawan SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang.

Kebijakan dan prosedur dalam melaporkan pelanggaran atau kecurangan keuangan ini ada dan berlaku dalam unit sekolah ini, itu menurut pernyataan yang dikatakan Ibu Siau Lie selaku Kepala Sekolah. Akan tetapi, dalam pengamatan langsung yang dilakukan peneliti tidak menemukan adanya peraturan yang ditempel pada mading atau papan pengumuman. Kebijakan dan prosedur ini hanya terdapat pada buku Juknis BOS dan pedoman penggunaan keuangan Yayasan.

2. Akuntabilitas Proses

Menurut hasil wawancara dengan peneliti, SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi dalam bentuk buku Juknis. Buku ini didapatkan langsung dari Kemendikbud dan dicetak serta dijilid oleh Bendahara Sekolah. Yayasan juga menggunakan surat keterangan yang berisikan peraturan dan prosedur keuangan yang jelas dan dicap basah oleh ketua Yayasan.

Meskipun penganggaran sesuai dengan Juknis, ada beberapa hal yang masih belum sesuai, seperti perubahan belanja dana BOS harus disetujui oleh Komite Sekolah selain Kemendikbud dan Kepala Sekolah. Dana Yayasan lebih dianggarkan untuk kebutuhan pegawai, sedangkan dana operasional untuk mutu pendidikan sebagian besar dibiayai oleh dana BOSP. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui SIPlah, yang telah digunakan selama 2 tahun oleh SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang.

Meskipun pengelolaan keuangan sudah baik, masih ada kekurangan seperti kurangnya keterbukaan dan keterlibatan semua pihak terkait, belum ada tim keuangan sekolah yang bertanggung jawab untuk pemantauan keuangan secara berkala, dan belum dilakukan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala oleh para pemangku kepentingan.

3. Akuntabilitas Program

Keterlibatan Komite Sekolah dan para wakil orang tua lainnya tidak memiliki kontribusi langsung terhadap SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang. Komite Sekolah baru terbentuk sekitar satu tahun yang lalu dan prosesnya dilakukan dengan bertahap. Ini disebabkan karena Kepala Sekolah sebelumnya tidak melibatkan Komite Sekolah secara aktif, sehingga Kepala Sekolah yang baru harus memulai dari awal untuk berinteraksi dengan Komite Sekolah.

Pemantauan rutin telah dilakukan untuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Sekolah swasta, seperti SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang, berbeda dengan sekolah negeri dalam hal penerimaan dana BOS. Sekolah negeri tidak memungut biaya dari siswa karena mereka telah menerima dana dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Namun, sekolah swasta diharuskan memungut Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dari setiap peserta didik.

Dana BOS yang diterima oleh SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang digunakan untuk kegiatan pendidikan, termasuk pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan minat dan keterampilan siswa, serta pelatihan guru. Dana BOS hanya digunakan untuk biaya operasional sekolah dan bukan untuk gaji guru dan pegawai pendidikan, yang ditanggung oleh Yayasan.

Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah ini mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dana BOS telah memberikan hasil yang diharapkan, dengan tenaga pendidik yang kompeten dan lingkungan pembelajaran yang berkualitas. Keberhasilan SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang dalam memberikan pendidikan yang baik juga mengindikasikan kualitas pendidikan yang baik.

Selain pengelolaan dana, evaluasi program pendidikan yang didanai oleh keuangan sekolah juga penting. Meskipun belum ada proses pengevaluasian yang sistematis, SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang menganggap hal ini penting untuk menjaga komunikasi yang baik dengan dewan sekolah dan masyarakat. Sekolah ini juga terbuka untuk menerima masukan dan saran dari Komite Sekolah untuk perbaikan selanjutnya.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang sudah melakukan kebijakan sesuai dengan juknis yang berlaku, hanya SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang belum melakukan evaluasi dan pensosialisasian secara berkala. Namun, mereka menyadari pentingnya melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif.

Penerapan Prinsip Transparansi

Dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator menurut Suttedjo (2009), indikator yang dapat menunjukkan transparansi sekolah, yaitu:

1. Keterbukaan Kebijakan Anggaran Sekolah

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip transparansi sangat penting bagi penganggaran dana BOS dan Yayasan. Keterbukaan kepada semua warga sekolah memiliki efek positif. Keterbukaan antar semua warga sekolah memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum. Akan tetapi, dalam praktiknya, SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang tidak terlalu menerapkan prinsip transparansi dengan baik hal ini ditunjukkan dari proses akses terhadap kebijakan anggaran sekolah masih belum tersedia secara online maupun offline kepada para *stakeholder*, kurang detailnya penyampaian anggaran sekolah, dan juga penyampaian pelaporan penggunaan dana secara jelas terhadap pengeluaran setiap hal apapun.

2. Keterbukaan Dokumen Anggaran Sekolah

Dari beberapa hasil wawancara, peneliti mengetahui bahwa SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang memiliki kinerja pengarsipan dokumen sangat baik dan lengkap sekali. Akan tetapi, berkaitan dengan publikasi dokumen yang telah dibuat masih belum disampaikan secara mendetail dan berkala. Penyampaian dokumen hanya secara garis besar melalui rekapan Laporan Realisasi Anggaran per tahun kepada para orang tua peserta didik dan staf sekolah. Dan dokumen anggaran SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang telah mencakup informasi yang memadai tentang alokasi dana berbagai kegiatan dan program sekolah.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dokumen anggaran masih belum transparan secara langsung di sekolah maupun online tetapi sudah mencakup informasi yang memadai.

3. Keterbukaan Laporan Pertanggungjawaban

SD Santa Theresia I Pangkalpinang mengalami tantangan dalam transparansi dan keterbukaan informasi terkait laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana sekolah. Audit eksternal yang dilakukan oleh Kemendikbud masih kurang rutin. Rekomendasi telah diajukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana sekolah. Laporan pertanggungjawaban SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang sudah cukup lengkap dalam pelaksanaan program dan monitoring keuangan, tapi masih perlu peningkatan dalam keterbukaan informasi tentang penggunaan dana secara mendetail. Penting untuk terus mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di masa depan.

4. Terdapat Kemudahan Akses Informasi bagi Publik

Berdasarkan hasil wawancara dengan SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang, terlihat bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah masih menjadi tantangan. Meskipun telah ada upaya untuk menyampaikan informasi keuangan secara langsung kepada orang tua peserta didik dan ketua komite sekolah, namun belum ada pelaksanaan transparansi yang memadai secara online sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku. SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang mengandalkan prosedur permintaan informasi langsung kepada bendahara atau kepala sekolah sebagai mekanisme untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang pengelolaan dana sekolah. Meskipun demikian, prosedur ini tidak terdokumentasikan secara tertulis dan belum diatur dengan jelas melalui kebijakan formal.

Penerapan Prinsip Efektivitas

Dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator menurut Mulyono (2010:146), yaitu:

1. Proses Perencanaan

Proses perencanaan dana sekolah di SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Dengan adanya tanggung jawab dari berbagai pihak yang terlibat dalam sekolah tersebut dapat membuat satuan pendidikan tersebut semakin baik dan berkualitas serta akuntabilitas. Oleh karena itu, dapat memberikan informasi tentang perencanaan operasional dan perencanaan anggaran untuk tahun mendatang secara terbuka akan membuat masyarakat luas banyak berminat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Akan tetapi, telah diketahui sebelumnya bahwa SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang dalam prinsip akuntabilitas masih terdapat kekurangan dalam hal keterlibatan komite sekolah dan para orang tua peserta didik.

Dalam hal keefektivan perencanaan anggaran BOS Reguler ini telah baik dan juga memprioritaskan kebutuhan sekolah pada umumnya, tetapi dalam dana Yayasan masih kurang efektif dikarenakan terdapat kegiatan seperti perayaan kegiatan sekolah dalam rangka meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan, ulang tahun sekolah, mempromosikan sekolah dalam bentuk berbagai event menakjubkan, dan kegiatan rekoleksi para siswa kelas 6 serta guru dan karyawan SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang, dan kegiatan lainnya membutuhkan dana yang besar. Dalam banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang ini tentu sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit pula. Dalam

mengadakan sebuah acara kita tentu akan membuat sebuah perencanaan anggaran di mana kita akan memperkirakan berapa saja anggaran yang akan kita keluarkan secara mendetail, dalam merinci dana tersebut terkadang para panitia membuat tanpa melihat harga yang berlaku sekarang tetapi melihat patokan harga sebelumnya, ini merupakan salah satu kesalahan dalam merinci anggaran yang di mana dapat membuat SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pada setiap kegiatan juga kami akan meminta bantuan dana dari para sponsor. Tentu tidak semuanya menyetujui proposal kami, dikarenakan dalam satu tahun telah banyak mengadakan kegiatan. Hal-hal itulah yang mengakibatkan penganggaran dana Yayasan untuk prioritas sekolah kurang efektif.

2. Proses Pengorganisasian dan Pengarahan

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang mampu membuat para karyawan memahami peran dan tanggung jawab mereka terkait pengelolaan keuangan. Akan tetapi, dari penjelasan sebelumnya terdapat masih kurangnya diadakan evaluasi mengenai pengelolaan penggunaan keuangan. Hal ini peneliti lihat bahwa SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang telah melakukan segala peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan mereka sendiri, akan tetapi kenyataannya evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran dana yang menyebabkan ketidakefektifan dalam penggunaannya masih tidak dilakukan secara berkala.

3. Proses Pelaksanaan dan Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang dilakukan dengan baik dengan melaporkan hasil kegiatan berupa keuangan secara berkala terhadap pihak yang berkepentingan.

SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang juga memiliki sistem pencatatan yang memadai dan terdokumentasi dengan baik.

Dalam Juknis BOS tertulis bahwa setiap satuan pendidikan harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian, secara tertulis di buku akuntansi, dan melalui microsoft excel lalu dicetak, seperti penjelasan yang telah peneliti ungkapkan dalam pembahasan pada indikator sebelumnya.

4. Proses Pengawasan

Dari ketiga pertanyaan yang diajukan peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang ini sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam mengelola keuangan sekolah mereka tidak ditemukan melakukan pelanggaran dan juga melakukan sebuah penyelewengan dana yang telah disalurkan baik dari Yayasan maupun dari Pemerintah Pusat. Dengan adanya Kepala Sekolah yang bijak dan tegas maka tentu sekolah tersebut akan memiliki reputasi yang baik juga.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Swasta Santa Theresia I Pangkalpinang telah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan integritas

dalam pengelolaan keuangannya. Meskipun demikian, masih ada area yang perlu perbaikan, seperti peningkatan transparansi informasi, keterlibatan aktif komite sekolah, dan evaluasi efektivitas program pendidikan. Dokumentasi keuangan yang baik tetapi akses terhadap informasi masih terbatas, dan pengawasan terhadap penggunaan dana belum optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Peningkatan komunikasi eksternal: Aktif melibatkan pihak eksternal seperti orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat dalam proses akuntabilitas. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, laporan berkala, atau forum terbuka.
2. Pelatihan dan peningkatan kesadaran: Memberikan pelatihan reguler kepada staf sekolah tentang kebijakan dan prosedur terkait akuntabilitas keuangan. Ini akan membantu memastikan bahwa semua anggota staf memiliki pemahaman yang sama dan mematuhi prosedur yang ditetapkan.
3. Publikasi informasi secara luas: Memastikan bahwa semua kebijakan, dokumen anggaran, dan laporan keuangan tersedia secara terbuka untuk diakses oleh semua pihak terkait. Ini dapat dilakukan melalui situs web sekolah, buletin, atau pertemuan dengan orang tua.
4. Meningkatkan aksesibilitas informasi: Menyediakan akses yang mudah dan cepat ke informasi keuangan sekolah, baik secara online maupun dalam bentuk cetak. Ini akan membantu meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan dari semua pihak terkait.
5. Perbaikan proses pengelolaan anggaran: Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan proses pengadaan barang dan jasa. Memastikan bahwa evaluasi efektivitas program dilakukan secara teratur dengan melibatkan aktif komite sekolah dan wakil orang tua.
6. Penguatan sistem pengawasan internal: Mengoptimalkan penggunaan tim keuangan sekolah untuk memantau dan mengevaluasi keuangan secara berkala. Memastikan bahwa audit internal dilakukan dengan lebih teratur dan mendalam untuk mengidentifikasi area perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1] Laila, Umi Nur. (2018). Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang. Skripsi (dipublikasikan) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2] Putri, Delia Ananda. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Manajemen Keuangan Pelaku UMKM. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(4), 62-73. file:///C:/Users/TU%20SD%20Theresia%20I/Downloads/655-Article%20Text-1131-1-10_20210312.pdf
- 3] Nopus, Shilvia Hayatun. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus Pada Seluruh

- SMP/MTsN di Kabupaten Aceh Tenggara). Skripsi (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 4] Larasati, P. A. dan Handayani, N. (2020). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD di KB Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 2-16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4098/4110>
 - 5] Nisak, Danin Khoerun. (2017). Pengaruh Prinsip Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMA Negeri 02 Kendal). Skripsi (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. <https://lib.unnes.ac.id/30712/1/7101413364.pdf>
 - 6] Mulyani, Hendarti Tri Setyo dan Octalia, Caecelia. (2023). Keterkaitan Sustainability Report Dengan Kesiapan Implementasi Regulasi Pemerintah Melalui Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. *Jurnal Media Akuntansi*, 6(1), 79-86. <https://jurnal.univpgrilembang.ac.id/index.php/mediasi/article/view/13175/7671>
 - 7] Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Republik Indonesia.
 - 8] Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Republik Indonesia.
 - 9] Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2018). Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pangkalpinang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 10] Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2023). Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pangkalpinang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 11] Rusdiana dan Wardija. (2022). Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah (Edisi Revisi ke-IV). Bandung: Arsad Press. Diakses Kamis, 30 Maret 2023. https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_KEUANGAN_SEKOLAH/5-pcEAAAQBAJ?hl=id
 - 12] Yusuf, M. (2022). Akuntabilitas Melintas Zaman. *Tohar Media*. Diakses Sabtu, 1 April 2023. https://books.google.co.id/books?id=G17EAAAQBAJ&pg=PA13&dq=Akuntabilitas&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4MmJuLjAhUYwTgGH6I DBkO6wF6BAgFEAU#v=onepage&q=Akuntabilitas&f=false